



UPAYA KENDALIKAN LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK Pasangan Usia Subur Didorong Ikut Program KB

YOGYA (KR) - Pasangan usia subur (PUS) di Kota Yogya didorong mengikuti program Keluarga Berencana (KB) yang digulirkan pemerintah. Upaya tersebut sebagai bagian untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk dan angka kelahiran.

Analisis Kebijakan Ahli Muda Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Yogya Ummatul Baroroh, menjelaskan secara capaian di tahun 2024 peserta KB aktif meningkat tapi secara jumlah menurun.

"Kalau jumlah angkanya itu turun karena ada PUS yang lulus. Usia PUS itu kan 15 sampai 49 tahun, jadi ada yang menopause dan ada juga yang memutuskan untuk menambah anak sehingga bukan tidak lagi menjadi peserta

KB aktif," jelasnya, Minggu (2/2).

Tercatat jumlah PUS di Kota Yogya pada tahun 2023 sebanyak 39.074 pasangan dengan kepesertaan KB aktif 63,51 persen. Sementara di tahun 2024 menjadi 37.870 pasangan dengan tingkat kepesertaan KB aktif 62,80 persen. Pihaknya menyatakan, cakupan KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) menggunakan dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) sepanjang tahun 2024 sebanyak 1.957 akseptor.

"KB MKJP yang paling banyak dipilih adalah IUD, setelah itu baru metode implan. Selanjutnya MKJP Metode Operasi Wanita (MOW) atau tubektomi dan Metode Operasi Pria (MOW) atau vasektomi. Tentunya kesadaran masyarakat PUS harus terus didorong agar lebih memilih KB MKJP dibandingkan KB tradisional ataupun metode jangka

pendek," imbuhnya.

Sejauh ini, lanjut Umma, sosialisasi MKJP terus dilakukan di tiap wilayah baik melalui tenaga kesehatan di puskesmas maupun kader KB. Setiap ibu hamil yang melakukan pemeriksaan kehamilan, diberikan edukasi tentang metode KB yang bisa dipilih setelah melahirkan. "Di fasilitas kesehatan tingkat pertama, setiap ibu hamil di trimester pertama diberitahu apa saja metode KB, kemudian trimester kedua mulai pemantapan, setelah melahirkan mau menggunakan KB apa," tandasnya.

Dirinya mengatakan, untuk mengakses KB MKJP, PUS dengan BPJS bisa mengaksesnya gratis di fasilitas kesehatan tingkat pertama atau selanjutnya. Sementara PUS yang bukan peserta BPJS atau mandiri, juga bisa mengakses KB MKJP secara gratis melalui

layanan dari DP3AP2KB Kota Yogya. "Layanan MKJP gratis dari Pemkot secara reguler setidaknya satu bulan sekali di fasilitas kesehatan yang sudah bekerja sama baik itu puskesmas, RSUD, rumah sakit swasta atau klinik dan juga praktik bidan mandiri. Kami juga akan berikan fasilitasi tambahan bagi akseptor seperti konsumsi dan biaya transportasi," terangnya.

Umma berharap, bagi PUS yang sudah mengakses KB MKJP juga bisa membagikan pengalamannya ke PUS lain di sekitarnya. Sehingga ada informasi berantai dari mulut ke mulut untuk mengajak PUS melakukan KB. "Dari DP3AP2KB juga ada petugas KB di masing-masing kementren yang mendorong dan mengajak PUS untuk merencanakan kehamilan, jumlah anak dan jarak kelahiran untuk menuju keluarga yang berkualitas," jelasnya. **(Dhi)-f**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 03 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005